

CASCADING TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup
INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
INDIKATOR 2 : Persentase Pengurangan Sampah pada Sumbernya

SASARAN 1			Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tingkat Eselon II
INDIKATOR 1	Indeks Kualitas Air (IKA)			(Kepala Dinas)
INDIKATOR 2	Indeks Kualitas Udara (IKU)			
INDIKATOR 3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			
S.1.1	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup			Tingkat Eselon III
IK.1.1	Persentase perencanaan lingkungan hidup		100%	(Kepala Bidang)
S.1.1.1	Tersusunnya Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.1.1	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.1.1.1.2	Tertaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			
IK.1.1.1.2	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		1 dokumen	
S.1.1.2	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.1.2	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		2 Dokumen	(Kepala Seksi)
S.1.1.2.1	Tersusunnya KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
IK.1.1.2.1	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun		1 dokumen	
S.1.2	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Tingkat Eselon III
IK.1.2	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100%	(Kepala Bidang)
S.1.2.1	Tertaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.2.1	Jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		5 dokumen	(Kepala Seksi)
S.1.2.1.1	Tertaksananya Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			
IK.1.2.1.1	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)		75 lokasi	
S.1.2.1.2	Tertaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Kabupaten/Kota			
IK.1.2.1.2	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan		2 unit	
S.1.2.1.3	Tertaksananya Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			
IK.1.2.1.3	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim		1 laporan	
S.1.2.1.3	Tersusunnya dokumen status lingkungan hidup daerah			
IK.1.2.1.3	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		1 dokumen	
S.1.2.1.3	Tertaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			
IK.1.2.1.3	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		30 Dokumen	
S.1.2.2	Tertaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.2.2	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota persentase kegiatan penanggulangan pencemaran		1 dokumen	(Kepala Seksi)
S.1.2.2.2	Tertaksananya Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
IK.1.2.2.2	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		2 lokasi	
S.1.2.3	Tertaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.2.3	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		5 upaya pemulihan	(Kepala Seksi)
S.1.2.3.1	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			
IK.1.2.3.1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhenti Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		1 dokumen	
S.1.2.3.1	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			
IK.1.2.3.1	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		1 kegiatan	
S.1.3	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		100%	(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Tertaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 dokumen	(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
IK.1.3.1.1	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1,9 ha	
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			
IK.1.3.1.1	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		1 unit	

S.1.3	Tertaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%		(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Tertaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	8 dokumen		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
IK.1.3.1.1	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			
IK.1.3.1.1	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan		
S.1.3.1	Tertaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
IK.1.3.1.1	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen		
S.1.3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100%		(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
IK.1.3.1.1	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 dokumen		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
IK.1.3.1.1	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
IK.1.3.1.1	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 badan usaha		
S.1.3	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%		(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Tertaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
IK.1.3.1.1	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 dokumen		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup			
IK.1.3.1.1	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120 orang		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			
IK.1.3.1.1	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 lembaga		
S.1.3	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%		(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Tertaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 penghargaan		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
IK.1.3.1.1	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 entitas		
S.1.3	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Tingkat Eselon III
IK.1.3	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%		(Kepala Bidang)
S.1.3.1	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Tingkat Eselon IV
IK.1.3.1	Jumlah pengaduan yang ditangani	25 pengaduan		(Kepala Seksi)
S.1.3.1.1	Tertaksananya Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota			
IK.1.3.1.1	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	25 pengaduan		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			
IK.1.3.1.1	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1 perkara		
S.1.3.1.1	Tertaksananya Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota			
IK.1.3.1.1	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	24 perkara		

SASARAN 2		Meningkatnya Pengelolaan Sampah		Tingkat Eselon II
INDIKATOR 1		Persentase Pengelolaan Sampah	100%	(Kepala Dinas)
S.2.2		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Tingkat Eselon III
IK.2.2		Persentase pengelolaan persampahan	100%	(Kepala Bidang)
S.2.1.1		Tertaksananya Pengelolaan Sampah		Tingkat Eselon IV
IK.2.1.1		Jumlah sampah yang dikelola	420,00 ton	(Kepala Seksi)
S.2.1.1.1		Tertaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
IK.2.1.1.1		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	23 kelompok	
S.2.1.1.2		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		
IK.2.1.1.2		Jumlah Dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	
S.2.1.1.3		Tertaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah		
IK.2.1.1.3.1		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	
S.2.1.1.4		Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus		
IK.2.1.1.4		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	1 dokumen	
S.2.1.1.6		Tertaksananya Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan		
IK.2.1.1.6		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107,123,85 ton	
S.2.1.1.6		Tertaksananya Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah		
IK.2.1.1.6		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 ton	
S.2.1.1.1		Tertaksananya Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah		
IK.2.1.1.1		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 unit	
S.2.1.1.2		Tertaksananya Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah		
IK.2.1.1.2		Persentase luas layanan pengumpulan sampah	100%	
S.2.1.1.3		Tertaksananya Penanganan Sampah melalui Pemeliharaan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biogaster, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan		
IK.2.1.1.3.1		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biogaster, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	559,86 ton	
S.2.1.1.4		Tertaksananya Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah		
IK.2.1.1.4		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 laporan	
S.2.1.1.6		Tertaksananya Pengurangan Sampah melalui Pendaur Ulang Sampah		
IK.2.1.1.6		Jumlah sampah yang terdaur ulang	7 ton	
S.2.1.1.6		Tertaksananya Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		
IK.2.1.1.6		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	107,123,85 ton	

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pontianak

Mulyono, MT
Pembina Tingkat 1
Nip.19671017 199703 0 002